

KELANGKAAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN UDANG DI JAWA TIMUR

Oleh : Adrian D. Lubis¹

ABSTRACT

Indonesia is one of a main shrimp producers in the world. But in last two years, some shrimp industries, especially in East Java is complained to raw material insufficiency, and continually require goverment to give permission to import. However, the goverment does not allow shrimp import to prevent the spread of white sport syndrome virus in Indonesia.

The study found that the raw material scarcity is only happens in East Java. It also predct that Indonesia's shrimp supply will increase in the future. The abundance of shrimp supply will make Indonesia is likely donot need shrmp import. However, some recomendation is needed for goverment to issue special policy in supply continuing in East Java.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan proses produksinya, Industri udang dibagi menjadi dua bagian, yaitu industri hulu dan industri hilir. Industri hulu mencakup proses produksi di areal tambak maupun zona penangkapan udang. Sedangkan industri hilir mencakup proses pengolahan udang dari bentuk mentah menjadi bentuk beku atau bentuk olahan lainnya. Selama ini jumlah

prosesing ikan dan udang di Indonesia cukup besar yang bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa jumlah unit prosesing di Indonesia adalah sebanyak 443 buah dengan kapasitas penyimpanan sebesar 64.115 Ton. Sedangkan kapasitas pengolahan/ prosesing sebesar 6.443,44 ton/hari. Artinya, realitas lapang menunjukkan bahwa kapasitas yang baru dimanfaatkan sekitar 3.019,61 ton/hari, sehing-

¹ Peneliti Pertama pada Puslitbang Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Telp. (021) 23528683 Hp. 08129646815 Email : adrian_d_lubis@yahoo.com

Tabel 1.
Jumlah Unit Prosesing Ikan dan Udang berdasarkan Lokasi dan Kapasitas (2004)

No	Propinsi	Jumlah Unit Proses	Kapasitas			Tenaga Kerja (org)
			Cold Storage (Ton)	Processing Unit (Ton/Hari)	Real Capacity (Ton/Hari)	
1	Sumatera	55	10,374.50	687.74	306.05	24,173
2	Jawa dan Bali	223	33,553.50	2,061.80	1,232.16	33,581
3	Kalimantan	41	3,820.00	98.9	74.6	7,288
4	Sulawesi	83	13,592.00	1,119.50	589	9,553
5	Nusa Tenggara	6	320	32	23.4	231
6	Maluku	16	600	200	45	503
7	Papua	19	1,855.00	2,243.50	749.4	3,409
TOTAL		443	64,115.00	6,443.44	3,019.61	78,738

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan

ga dapat dikatakan bahwa utilitas prosesing baru dimanfaatkan sekitar 45 sampai dengan 50% kapasitas terpasang.

Hal ini menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan performa industri perikanan di masa mendatang. Selain peningkatkan produksi, pemaksimalan pemanfaatan unit prosesing melainkan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2004, penyerapan tenaga kerjanya hanya mencapai 78,738 orang. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa industri prosesing ikan masih terpusat di wilayah Jawa dan Bali yaitu sebesar 50,34%, sedangkan pulau Sulawesi dan Sumatera, masing-masing sebesar 18,74% dan 12,42% dari jumlah total unit prosesing.

Salah satu kendala yang menyebabkan kapasitas industri prosesing tidak maksimal adalah kelangkaan bahan baku yang dibutuhkan industri. Kelangkaan bahan baku ini menyebabkan harga udang domestik menjadi lebih mahal dari udang internasional. Sebagai contoh², harga udang bulan Oktober 2008 untuk size 50 adalah Rp 39 ribu per kg. Harga tersebut naik sekitar 20% dari harga sebelumnya, yaitu Rp 33 ribu per kg. Sementara untuk ukuran yang sama di pasar internasional, Thailand bisa menjual udangnya dengan harga Rp 32 ribu per kg. Meski merugi, sebuah perusahaan pengolahan udang di Jawa Timur tetap harus membelinya agar pabrik tetap bisa berproduksi.

Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan eksportir udang

² Trobos, Agustus 2008. *Sekadar Gudang Bahan Baku*.

sebenarnya menghasilkan produksi udang yang melimpah. Namun, harga jual produk udang domestik yang lebih tinggi dari harga internasional menyebabkan industri pengolahan udang nasional menjadi tidak efisien. Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala ini adalah masuknya udang impor yang dipercaya sebagian pelaku usaha akan mendorong gairah industri udang nasional³.

Meskipun sebagian pelaku usaha pengolahan menginginkan masuknya udang impor, namun saat ini pemerintah masih melarang impor udang, guna mencegah masuknya virus dan penyakit udang dari luar guna menjaga agar budidaya udang nasional berjalan baik. Adapun kebijakan ini dapat dilihat dari Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No.23/M-DAG/PER/6/2008 dan No. PB.01/MEN/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Indonesia. Pemerintah memutuskan larangan impor udang *vannamei* berupa beku dan segar, termasuk dalam bentuk olahan berlaku selama enam bulan ke depan. Adapun untuk produk lain yang dapat diimpor, harus dilengkapi dengan surat keterangan asal (*country of origin certificate*/COO, atau SKA). Hal ini sesuai dengan ketentuan ketertelusuran (*traceability*) dalam perdagangan produk perikanan yang diterapkan untuk memasuki pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai kebutuhan Indonesia dalam melakukan impor udang, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan udang nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia mengimpor udang beku, dan jika perlu, bagaimana agar impor udang beku tersebut tidak merugikan produsen udang dalam negeri.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah :

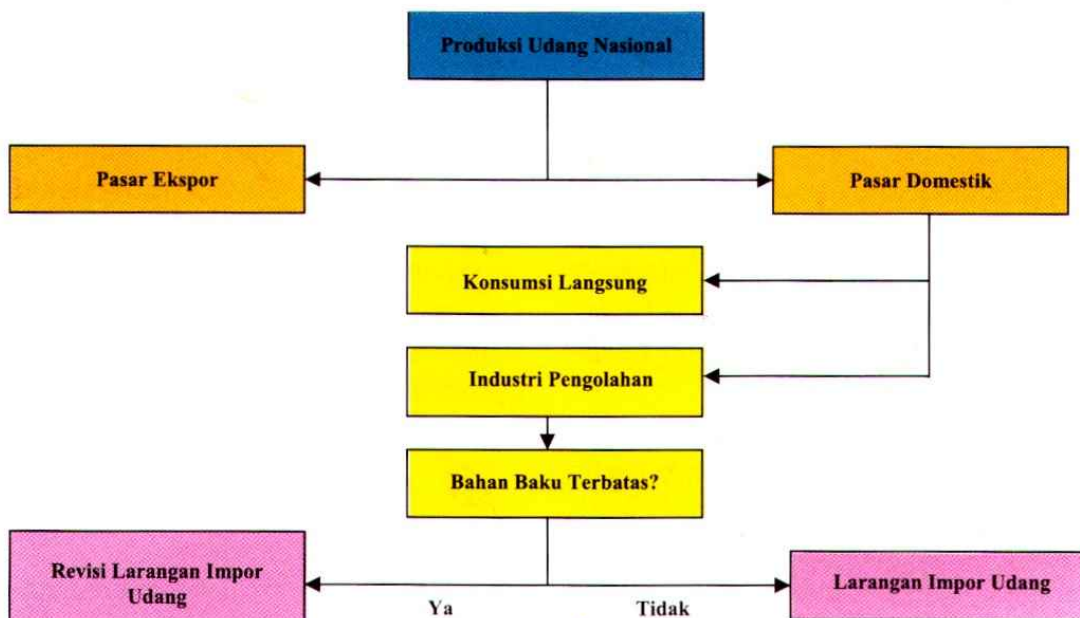
1. Melakukan analisa produksi dan konsumsi udang nasional.
2. Melakukan analisa kemungkinan diizinkan impor udang untuk menunjang industri pengolahan udang dalam negeri.
3. Melakukan review atas peraturan tentang larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Indonesia.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : (Lihat Gambar 1.)

Kajian ini bertujuan menganalisa perubahan produksi, ekspor dan konsumsi udang nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat diketahui ketersediaan udang nasional yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan . Data mengenai ketersediaan

³ Neraca, 22 Juli 2004. *Impor Udang Jangan Dilarang, Tapi Dihambat*.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

bahan baku industri udang dapat memberikan informasi apakah memang terjadi keterbatasan bahan baku udang atau tidak. Jika ternyata bahan baku terbatas, maka diperlukan kebijakan untuk merevisi larangan impor udang, dan demikian juga sebaliknya.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai terbatasnya baku industri udang. Adapun beberapa kemungkinan antara lain :

1. harga udang yang mahal karena industri tambak udang Indonesia tidak seefisien negara pesaing, atau
2. biaya transportasi yang tinggi menyebabkan perusahaan pengolahan terpaksa membeli udang

dengan harga yang relatif mahal karena terbatas dalam akses bahan baku, sebagian petambak udang mungkin sudah terikat kontrak jangka panjang untuk memasok udang kenegara tertentu, dan kemungkinan lainnya.

3.

II. TINJAUAN INDUSTRI DAN PASAR UDANG NASIONAL

2.1. Industri Udang Nasional

Industri pengolahan produk ikan dan udang di Indonesia masih belum tumbuh optimal, dimana hal ini dapat dilihat dari total produksi tangkapan laut, hanya sebesar 57.05 persen yang dimanfaatkan

sebenarnya menghasilkan produksi udang yang melimpah. Namun, harga jual produk udang domestik yang lebih tinggi dari harga internasional menyebabkan industri pengolahan udang nasional menjadi tidak efisien. Salah satu alternatif untuk mengatasi kendala ini adalah masuknya udang impor yang dipercaya sebagian pelaku usaha akan mendorong gairah industri udang nasional³.

Meskipun sebagian pelaku usaha pengolahan menginginkan masuknya udang impor, namun saat ini pemerintah masih melarang impor udang, guna mencegah masuknya virus dan penyakit udang dari luar guna menjaga agar budidaya udang nasional berjalan baik. Adapun kebijakan ini dapat dilihat dari Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No.23/M-DAG/PER/6/2008 dan No. PB.01/MEN/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Indonesia. Pemerintah memutuskan larangan impor udang *vannamei* berupa beku dan segar, termasuk dalam bentuk olahan berlaku selama enam bulan ke depan. Adapun untuk produk lain yang dapat diimpor, harus dilengkapi dengan surat keterangan asal (*country of origin certificate/COO*, atau SKA). Hal ini sesuai dengan ketentuan ketertelusuran (*traceability*) dalam perdagangan produk perikanan yang diterapkan untuk memasuki pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai kebutuhan Indonesia dalam melakukan impor udang, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan udang nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perlu atau tidaknya Indonesia mengimpor udang beku, dan jika perlu, bagaimana agar impor udang beku tersebut tidak merugikan produsen udang dalam negeri.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah :

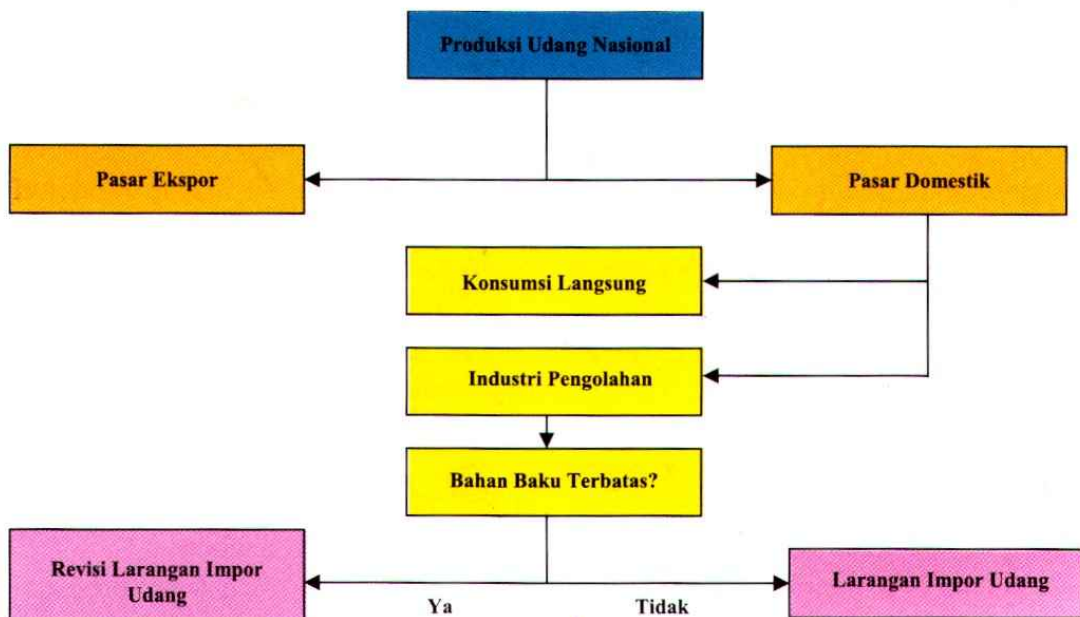
1. Melakukan analisa produksi dan konsumsi udang nasional.
2. Melakukan analisa kemungkinan diizinkan impor udang untuk menunjang industri pengolahan udang dalam negeri.
3. Melakukan review atas peraturan tentang larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Indonesia.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : (Lihat Gambar 1.)

Kajian ini bertujuan menganalisa perubahan produksi, ekspor dan konsumsi udang nasional. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dapat diketahui ketersediaan udang nasional yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan. Data mengenai ketersediaan

³ Neraca, 22 Juli 2004. *Impor Udang Jangan Dilarang, Tapi Dihambat.*



Gambar 1. Kerangka Penelitian

bahan baku industri udang dapat memberikan informasi apakah memang terjadi keterbatasan bahan baku udang atau tidak. Jika ternyata bahan baku terbatas, maka diperlukan kebijakan untuk merevisi larangan impor udang, dan demikian juga sebaliknya.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai terbatasnya baku industri udang. Adapun beberapa kemungkinan antara lain :

1. harga udang yang mahal karena industri tambak udang Indonesia tidak seefisien negara pesaing, atau
2. biaya transportasi yang tinggi menyebabkan perusahaan pengolahan terpaksa membeli udang

dengan harga yang relatif mahal karena terbatas dalam akses bahan baku,

3. sebagian petambak udang mungkin sudah terikat kontrak jangka panjang untuk memasok udang kenegara tertentu, dan kemungkinan lainnya.

II. TINJAUAN INDUSTRI DAN PASAR UDANG NASIONAL

2.1. Industri Udang Nasional

Industri pengolahan produk ikan dan udang di Indonesia masih belum tumbuh optimal, dimana hal ini dapat dilihat dari total produksi tangkapan laut, hanya sebesar 57.05 persen yang dimanfaatkan

dalam bentuk basah, sedangkan 30,19 persen dalam bentuk olahan tradisional dan 10,90 persen dalam bentuk olahan modern dan olahan lainnya 1,86 persen. Sedangkan dari ekspor tahun 2005 sebesar 857.782 ton, sebesar 80 persen diantaranya didominasi oleh produk olahan modern, sedangkan produk olahan tradisional hanya sekitar 6 persen saja. Industri pengolahan produk perikanan di Indonesia umumnya masih menggunakan bahan baku dari ikan ekonomis (yang memiliki nilai jual), sedangkan ikan non ekonomis (antara lain ikan sisa industri dan berukuran kecil) umumnya langsung dibuang meskipun jumlahnya secara kuantitas cukup besar (Huseini, 2007).

Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan optimalisasi pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut melalui pengembangan produk bernilai tambah, baik tradisional maupun modern. Namun produk bernilai tambah yang diproduksi di Indonesia masih dari ikan ekonomis, seperti tuna dan udang kaleng, tuna steak, loin, dan lainnya. Sedangkan bagi ikan non ekonomis, agar dapat lebih diterima masyarakat dan memiliki nilai jual perlu diolah melalui teknologi produk perikanan (Huseini, 2007).

Namun saat ini terdapat beberapa kendala yang menghambat perkemba-

ngan industri pengolahan ikan dan udang di Indonesia, seperti 1). terbatasnya sarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal, 2). kurangnya bahan baku industri yang disebabkan kurangnya kerjasama industri penangkapan dengan pengolahan, 3). hasil tangkapan yang sebageian besar (80 persen) berasal dari nelayan skala kecil yang belum memenuhi standar industri pengolahan (Huseini, 2007)⁴.

Aisya *et.al.* (2005), meneliti dampak dari kebijakan insentif dan kinerja pasar ekspor udang Indonesia dengan menggunakan metode matrik kebijakan (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang berjalan saat ini tidak memberikan insentif bagi petani udang untuk berproduksi. Dampak kebijakan ini menyebabkan telah terjadi transfer penerimaan dari petani udang pada teknologi intensif dan semi intensif baik ke konsumen udang maupun ke produsen input. Secara umum terlihat bahwa dampak kebijakan output dan kinerja pasar udang yang berjalan masih kurang menguntungkan petani udang. Hasil analisis matrix kebijakan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi udang pada berbagai tingkatan penerapan teknologi produksi. Namun demikian, terlihat bahwa usaha udang yang dikelola

⁴ Informasi yang turut mendukung mengenai kendala keterbatasan bahan baku dalam industri perikanan dan udang dapat dilihat di beberapa media, antara lain Trobos, Agustus 2008. *Sekadar Gudang Bahan Baku*. dan Neraca, 22 Juli 2004. *Impor Udang Jangan Dilarang, Tapi Dihambat*.

secara intensif mempunyai daya saing yang paling tinggi, atau paling efisien dalam penggunaan biaya domestik.

Purnawan (2005) menemukan pula bahwa Indonesia masih terbuka peluang untuk mengembangkan tambak udang secara maju dan modern dengan budidaya secara intensif. Adapun pokok-pokok perencanaan tambak udang intensif meliputi perencanaan petak, perencanaan sistem pemasukan dan pembuangan air, perencanaan pola budidaya, perencanaan jaringan irigasi teknis lengkap dengan sarana dan peralatan penunjang yang dibutuhkan terutama penggunaan pompa dalam sistem irigasi yang diterapkan. Sasaran perencanaan tambak udang intensif ini adalah menciptakan suatu tambak udang intensif sebagai industri terpadu yang bernilai ekonomis tinggi tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

2.2. Pasar Udang Nasional

Tohier (2004) menemukan bahwa prospek komoditi udang di pasar domestik dan dunia sangat baik karena besarnya permintaan terhadap produk udang. Meskipun investasi usaha pada tambak udang di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik, karena daya dukung alam yang sangat baik dan potensial, namun investasi untuk revitalisasi tambak plasma udang windu (*Penaeus monodon*, Fabr.) dengan teknologi intensif membutuhkan biaya yang relatif besar.

Oleh karena itu petambak plasma membutuhkan pembiayaan eksternal misalnya dari perusahaan inti dan perbankan.

Syam (2008) meneliti strategi pemasaran udang windu dengan studi kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran distribusi udang windu dapat memberikan harga jual yang berbeda bagi petani tambak di Kabupaten Wajo, di mana harga jual yang tertinggi didapat petani dari saluran pertama yaitu petani menjual langsung ke konsumen. Selain itu margin dan efisiensi pemasaran udang windu di Kabupaten Wajo menguntungkan lembaga-lembaga pemasaran, di mana margin terbesar diperoleh jika petani menjual kepada pedagang pengumpul dan pedagang besar.

Farida (2008) menyatakan pula bahwa pertumbuhan industri *seafood* di Indonesia cukup bagus karena jumlah dan pertumbuhan ekspor yang besar dalam produk-produk tersebut, khususnya udang beku. Estimasi total ekspor mencapai Rp 13,1 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 16,5 triliun tahun 2007. Produk export utamanya adalah udang beku dengan negara tujuan terbesar adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Prospek export untuk produk-produk tersebut sangat cerah karena permintaan dunia yang meningkat. Akan tetapi, untuk industri ikan dalam kaleng, biaya produksi meningkat seiring dengan meningkatnya harga aluminium dan

melonjaknya harga minyak. Permintaan dalam negeri berkurang karena menurunnya daya beli masyarakat.

Studi yang dilakukan Lubis, *et.al.* (2007a) mempelajari mengenai pola struktur pasar, kinerja dan performa dari industri pengolahan nasional berukuran kecil dan menengah, termasuk industri pengolahan makanan berbahan baku ikan. Studi tersebut menemukan bahwa struktur pasar industri pengolahan berbahan baku ikan semakin bersaing dalam periode 1995-2004, dimana empat perusahaan besar mengalami penurunan pangsa pasar dari 55 persen di tahun 1995 menjadi 45 persen pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005, pangsa pasar keempat perusahaan terbesar tersebut kembali mencapai 55 persen dari industri pengolahan ikan nasional. Hasil studi ini menunjukkan bahwa struktur industri ikan nasional mengarah pada pasar monopoli.

Selain itu, dalam kinerja dan performa industri perikanan, terdapat penurunan kinerja dan performa pada masa krisis moneter, dimulai di tahun 1998 dan baru dapat pulih sampai dengan tahun 2001. Menurunnya performa dan kinerja industri berbahan baku ikan pada periode tersebut disebabkan banyaknya industri yang tutup akibat peningkatan biaya produksi yang melonjak secara signifikan (Lubis, 2007a).

Kinerja perdagangan produk perikanan dan udang Indonesia umumnya

dimonopoli oleh ikan dan udang beku yang belum memiliki nilai tambah tinggi. Meskipun demikian, Indonesia memiliki daya saing yang tinggi untuk produk perikanan dan udang di dunia, termasuk sebagai pemain utama yang menguasai sekitar 3 persen dari total nilai ekspor dunia. Selain itu, Indonesia memiliki nilai surplus perdagangan yang sangat tinggi untuk produk perikanan dan udang, di mana nilai ekspor lebih besar hampir lima puluh kali dari nilai impor produk tersebut. Selain itu, produk perikanan dan udang nasional relatif tidak terproteksi namun memiliki daya saing yang baik karena melimpahnya bahan baku nasional (Lubis, 2007b)

III. METODOLOGI

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari :

1. Data produksi, dan ekspor udang dari Departemen Kelautan dan Perikanan.
2. Data impor udang dari Trademap, International Trade Centre.
3. Data industri perikanan dari Statistik Perikanan dan Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Data penyebaran dan kapasitas produksi kamar dingin dan gudang beku, dari Direktorat Standarisasi & Akreditasi, Departemen Kelautan dan Perikanan.

3.2. Metode Kajian

3.2.1. Proyeksi Produksi, Konsumsi, Ekspor dan Impor

Proyeksi produksi, konsumsi, ekspor dan impor udang bertujuan memperkirakan ketersediaan udang domestik untuk masa yang akan datang. Nilai proyeksi diperoleh berdasarkan data neraca bahan makanan (*food balance sheet*) yang diterbitkan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.

Adapun perhitungan yang digunakan dalam neraca bahan makanan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor (PDNSE)
$$\text{PDNSE} = \text{Produksi} + \text{Stok} + \text{Impor}$$

(1)
- b. Penyediaan Dalam Negeri (PDN)
$$\text{PDN} = \text{PDNSE} - \text{Ekspor}$$

(2)
- c. Pemakaian Dalam Negeri Untuk Makanan (Makanan)
$$\text{Makanan} = \text{PDN} - \text{Konsumsi Manufaktur} - \text{Tercecer}$$

(3)

Adapun seluruh data yang digunakan dalam persamaan 1 sampai dengan 3 dalam satuan ton.

- d. Ketersediaan Perkapita Per Tahun (KP)
$$\text{KP} = \text{Makanan} / \text{Jumlah Penduduk}$$

(4)

Adapun satuan dalam ketersediaan perkapita adalah kilogram per tahun.

- e. Proyeksi dengan Menggunakan Trend

Setelah memperoleh data dari neraca bahan makanan, maka dilakukan perhitungan trend dari data produksi, ekspor, impor, dan konsumsi dengan menggunakan persamaan logaritma dimana variabel independent yang digunakan adalah waktu. Adapun persamaan yang digunakan adalah:

$$X = \log (X_t) \dots\dots\dots(5)$$

Selanjutnya, berdasarkan nilai trend, dilakukan proyeksi atas data produksi, ekspor, impor, dan konsumsi udang Indonesia.

3.2.2. Global Positioning System (GPS)

Penggunaan GPS dalam analisa ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai lokasi sentra produksi dan industri udang. Diperkirakan bahwa industri yang berlokasi jauh atau tidak memiliki hubungan langsung dengan produsen udang akan menemukan kesulitan untuk memperoleh bahan baku udang yang murah. Adapun hasil yang diharapkan adalah kartografi (peta-peta) yang merupakan peta tematik yang menggambarkan kriteria produksi, konsumsi, dan industri pengolahan udang nasional.

Pemanfaatan Global Positioning System (GPS) dalam kegiatan ini adalah media untuk menentukan posisi koordinat objek yang diteliti yang hasilnya akan digunakan dalam pengolahan dan analisis overlay peta tematik.

Software yang dipergunakan adalah pengolah data spasial yaitu ArcView 3.3, Spatial Analysis 2.0 Package dan Networking Analysis 1.0 Package. Keseluruhan proses adalah menggunakan prinsip Relational Database Management Structure (RDMS) dengan Rapid system analysis.

IV. ANALISIS KEBUTUHAN IMPOR UDANG

4.1. Proyeksi Produksi, Impor, Ekspor dan Ketersediaan Dalam Negeri

Ketersediaan udang domestik (nasional) merupakan hasil dari perubahan produksi udang, stok udang, impor udang, dan ekspor udang nasional. Berdasarkan perubahan dari keempat variabel tersebut, dapat diproyeksikan berapa nilai kebutuhan udang yang diperlukan untuk industri manufaktur dan konsumsi masyarakat.

Data yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai produksi udang, impor udang, ekspor udang dan udang yang dijual ke pasar domestik. Data yang digunakan diperoleh dari variasi berbagai sumber yaitu data produksi dan ekspor dari statistik perikanan, data impor dari trademap dan data udang yang dipasarkan kedalam negeri merupakan hasil penjumlahan dari produksi dan impor dikurangi ekspor.

Berdasarkan data dalam Tabel 2, terlihat bahwa produksi udang nasional tumbuh sebesar 14,19 persen pertahun, sedangkan ekspor berdasarkan volume tumbuh 3,39 persen per tahun. Adapun nilai impor diprediksikan mengalami penurunan dengan trend 38,89 persen per tahun. Penurunan trend impor yang sangat besar tersebut, disebabkan melimpahnya produksi udang domestik dan pemberlakuan larangan impor udang. Selanjutnya berdasarkan data produksi, ekspor dan impor dikalkulasikan untuk memperoleh data udang yang dipasarkan ke dalam negeri.

Berdasarkan data dalam Tabel 3 dan Gambar 2, dapat dianalisis rasio produksi udang terhadap pemasaran domestik dan ekspor. Gambar dan tabel tersebut memperlihatkan pada tahun 2004-2006, jumlah udang yang diekspor lebih besar dari pada jumlah udang yang dipasarkan kedalam negeri. Namun sejak tahun 2007, terjadi penurunan jumlah ekspor udang sehingga jumlah udang yang dipasarkan kedalam negeri semakin meningkat.

Gambar 3 memperlihatkan indeks pertumbuhan dan perubahan data produksi, ekspor, impor dan jumlah yang dipasarkan kedalam negeri untuk komoditas udang. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa indeks pertumbuhan produksi pada tahun 2011 diproyeksikan akan meningkat tiga kali lipat dari nilai produksi saat ini, dan disaat yang ber-

Tabel 2
Data dan Proyeksi Ketersediaan Udang Domestik

Tahun / Satuan	Produksi	Ekspor	Impor	Dipasarkan Kedalam Negeri
	ton	ton	ton	ton
Sumber	DKP	DKP	Trademap	Kalkulasi
2004	238,857	142,135	12,360	109,082
2005	280,629	153,906	757	127,480
2006	327,610	169,329	695	158,976
2007	358,925	157,545	2,464	203,844
2008	410,000	166,000	584	244,584
Trend	14.19	3.39	-38.89	23.17
Proyeksi				
2009	428,490	171,627	362	301,254
2010	492,764	177,446	224	371,055
2011	566,678	183,461	139	457,028
2011	651,680	189,680	86	562,921
2011	749,352	196,110	53	693,350

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

samaan, ekspor diproyeksikan akan meningkat satu koma tiga kali lipat dari saat ini. Sedangkan untuk impor, mengalami penurunan semenjak tahun 2005 dan terus menurun sampai tahun 2011.

Berdasarkan kondisi perubahan produksi, ekspor dan impor, terlihat bahwa semenjak tahun 2007, trend pertumbuhan produksi lebih tinggi dari trend pertumbuhan ekspor. Hal ini menyebabkan sebagian besar udang produksi akan dipasarkan kedalam negeri. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka diperkirakan pada tahun pada tahun 2011, jumlah udang yang dipasarkan kedalam negeri

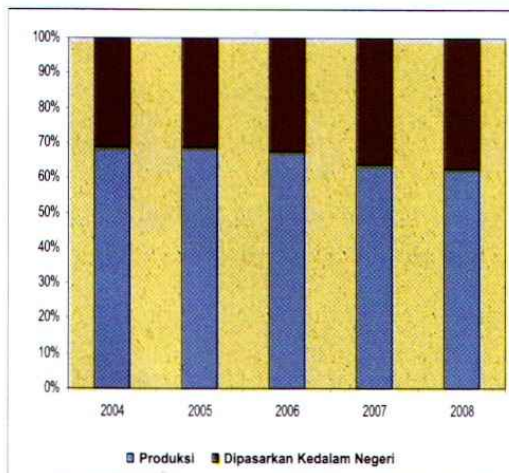
akan meningkat hampir mencapai tujuh kali lipat dibandingkan saat ini.

Meskipun hasil analisis ketersediaan dan proyeksi udang nasional menunjukkan produksi udang nasional semakin lama semakin banyak dijual ke pasar domestik, industri pengolahan udang domestik sampai saat ini masih mengeluhkan keterbatasan bahan baku. Salah satu keluhan yang disampaikan industri pengolahan adalah ketidaksesuaian udang yang diproduksi dengan kebutuhan mereka dan harga beli udang untuk bahan baku industri yang tinggi⁵.

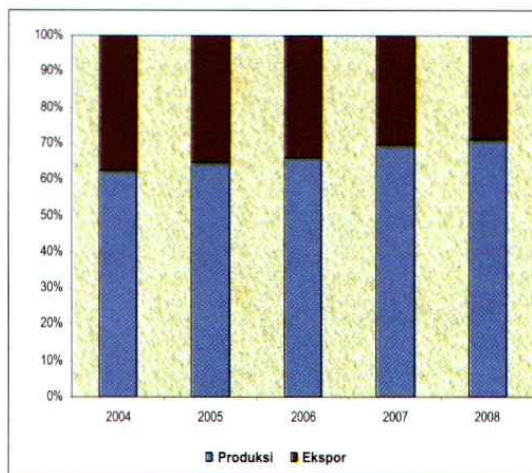
⁵ Kajian ini juga melakukan analisis mengenai ketersediaan udang nasional dengan menggunakan data Susenas, yang dapat dilihat dalam Lampiran 6. Hasil analisis tersebut juga menemukan rasio produksi terhadap ekspor yang lebih rendah dari rasio produksi terhadap pasar domestik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar udang saat ini lebih ditujukan kepasar domestik daripada pasar ekspor.

Gambar 2
Rasio Produksi Terhadap (a) Pemasaran Domestik dan (b) Ekspor

a. Pemasaran Domestik

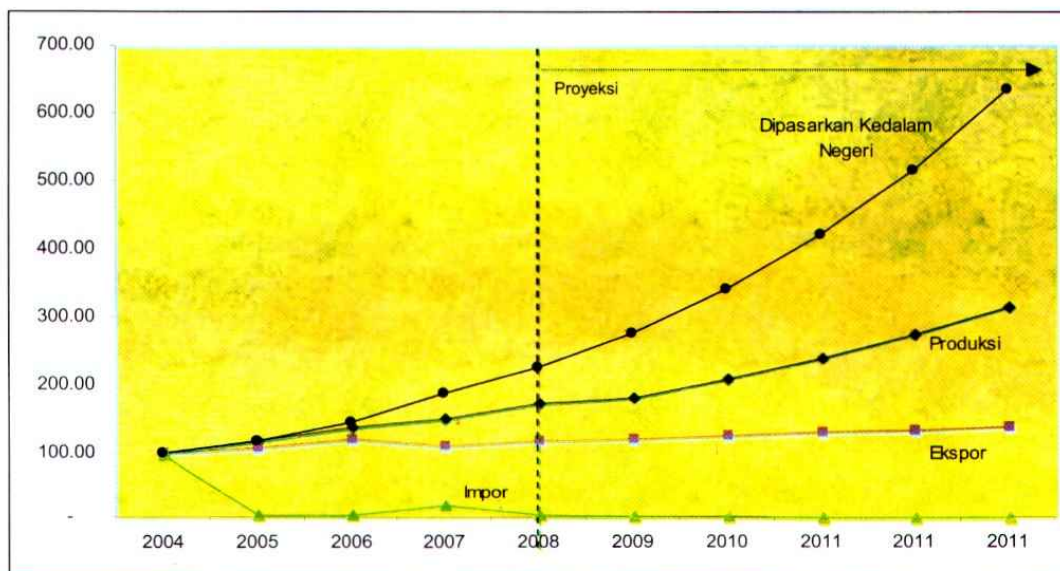


b. Ekspor



Sumber : Statistik Perikanan DKP dan Trade Map

Gambar 3
Indeks Proyeksi Produksi, Ekspor, Impor dan Dipasarkan Kedalam Negeri Untuk Komoditas Udang di Indonesia



Sumber : Statistik Perikanan DKP dan Trade Map, diolah

Namun, apakah keterbatasan bahan baku ini terjadi diseluruh Indonesia, atau hanya di beberapa daerah saja? Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dipelajari bagaimana kinerja industri udang nasional. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melakukan pemetaan kapasitas mesin dan penyediaan bahan baku udang nasional, yang akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan metode GIS.

4.2. Peta Tematik Industri Udang Indonesia

Peta tematik industri udang Indonesia bertujuan memberikan gambaran mengenai posisi, jumlah gudang beku (*cold storage*), kamar dingin (*chilling room*), dan utilitas produksi dari industri pengolahan udang. Peta tersebut akan memberikan gambaran apakah jumlah industri pengolahan di Indonesia tersebar merata, dan apakah produktifitas yang ditunjukkan dari nilai utilitas dari industri pengolahan di Indonesia juga merata atau hanya produktif di beberapa daerah. Adapun peta tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4 sampai dengan 6 di bawah.

Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa penyebaran gudang beku paling banyak berada di Jawa Timur dan Sulawesi Utara dengan jumlah 18.884 unit dan 12.360 unit. Tingginya investasi gudang beku di daerah tersebut disebabkan keduanya merupakan sentra pengumpulan udang di wilayah Indonesia

Timur. Daerah dengan jumlah gudang beku terbesar kedua adalah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Bali dan Jawa Tengah dengan jumlah 13.700 unit, 12.360 unit, 6.985 unit, 6.730 unit, dan 6.560 unit. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa industri gudang beku sebenarnya hanya terkonsentrasi di beberapa daerah di Indonesia, dengan konsentrasi utama di Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

Gambar 5 memperlihatkan penyebaran kamar dingin (*chilling room*) terkonsentrasi paling tinggi di Sumatera Utara dan DKI Jakarta dengan jumlah 4.082 unit dan 1.332 unit. Daerah lain yang juga memiliki kamar dingin cukup banyak adalah Lampung dan Jawa Timur dengan jumlah 1.137 unit dan 983 unit.

Berdasarkan gambaran penyebaran gudang beku dan kamar dingin, terlihat bahwa konsentrasi industri pengolahan udang Indonesia berada di Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara dengan persentase sebesar 19 persen, 14,4 persen, 11,9 persen, dan 10,6 persen.

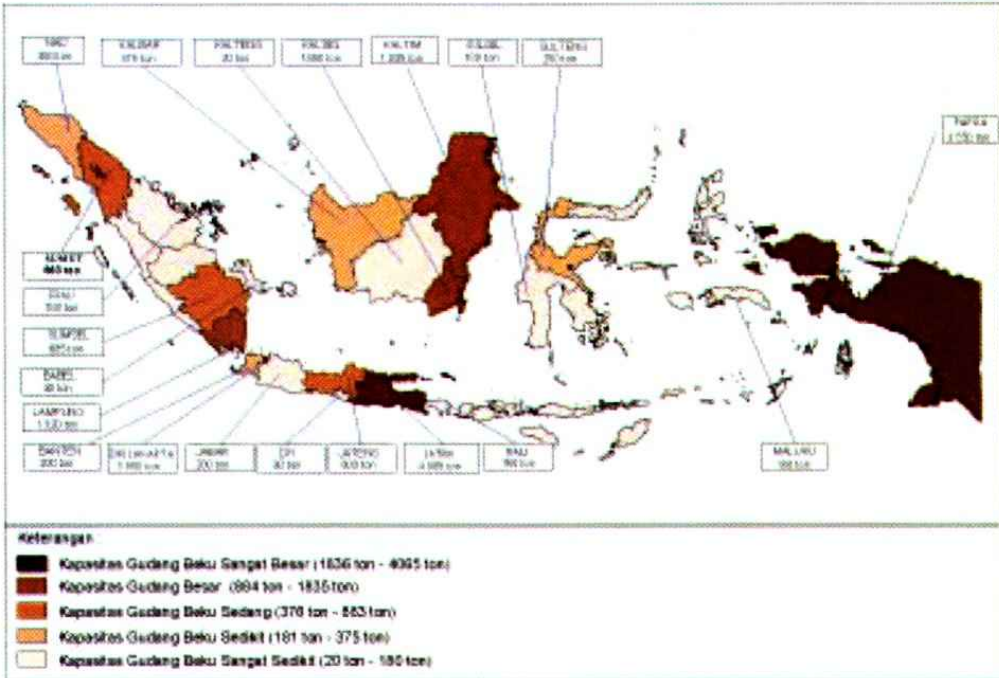
Gambar 6 di atas memperlihatkan nilai utilitas rata-rata industri pengolahan udang di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memiliki kemampuan untuk menggunakan utilitas di atas 70 persen dari total kapasitas terpasang mereka. Disisi lain, daerah lain

Keterangan:

- Kapasitas Kamar Dingin Sangat Banyak (1000 ton - 17814 ton)
- Kapasitas Kamar Dingin Banyak (401 ton - 1000 ton)
- Kapasitas Kamar Dingin Sedang (21 ton - 400 ton)
- Kapasitas Kamar Dingin Sedikit (5 ton - 20 ton)
- Kapasitas Kamar Dingin Sangat Sedikit (0 ton - 5 ton)

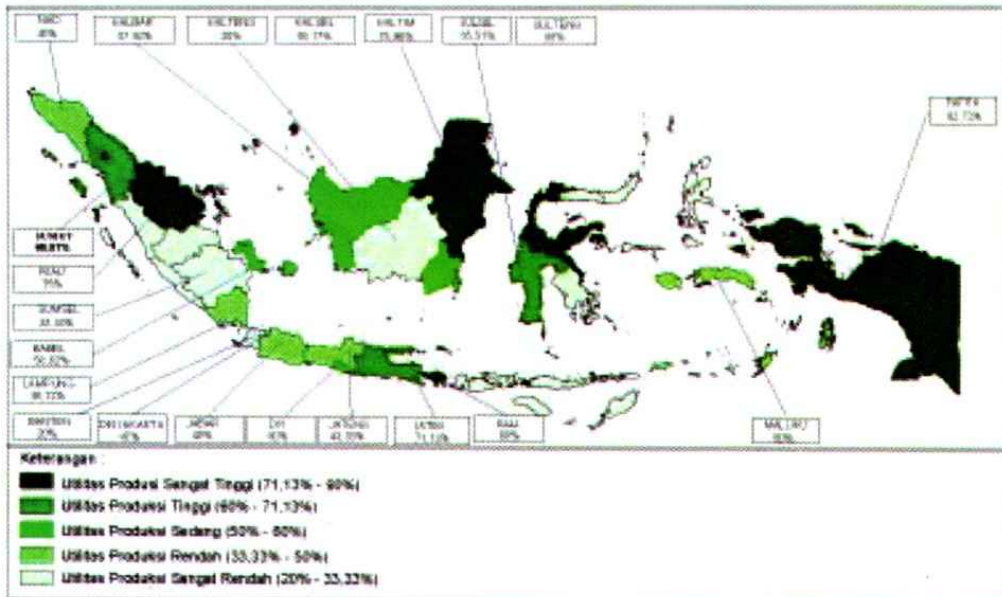
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. 3 No. 1, Juli 2009 - 145

Penyebaran Utilitas Produksi Udang Di Indonesia



Sumber : Diolah dari data Direktorat Standarisasi & Akreditasi

Penyebaran Rata-Rata Produksi Udang Di Indonesia



Sumber : Diolah dari data Direktorat Standarisasi & Akreditasi

yang memiliki jumlah industri pengolahan paling besar yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sumatera Utara hanya mampu memanfaatkan 66 persen, 55,1 persen dan 43,7 persen dari kapasitas terpasang mereka.

Data perbandingan persentase per-

propinsi untuk jumlah unit pengolahan, produksi terpasang, gudang beku, kamar dingin, rata-rata produksi industri pengolahan dan utilitas di seluruh Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 8. Data yang ditampilkan tersebut diurutkan berdasarkan pangsa dari rata-rata produksi nasional.

Tabel 3
Pangsa Per Propinsi Industri Pengolahan Udang Nasional

No	Propinsi	Jml UPI	Produksi Terpasang	Gudang Beku	Kamar Dingin	Rata-rata Produksi	Utilitas*)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	SUMUT	10.0	63.3	7.3	43.4	59.6	43.7
2	JATIM	23.7	8.0	19.8	10.5	11.5	66.0
3	DKI	14.1	4.9	14.3	14.2	5.8	55.1
4	SULUT	7.0	5.3	12.9	0.8	5.0	43.5
5	SULTRA	1.8	2.4	9.9	0.5	4.6	87.9
6	BALI	5.9	1.9	7.0	3.3	2.3	55.5
7	JATENG	6.2	2.0	6.8	4.5	2.1	48.6
8	SULSEL	7.0	1.6	0.1	0.0	2.0	58.8
9	PAPUA	2.4	1.4	6.1	1.3	1.8	59.8
10	LAMPUNG	1.0	1.4	1.5	12.1	0.8	27.5
11	KALTIM	2.7	0.4	2.0	0.0	0.6	67.1
12	MALUKU	1.4	0.4	1.3	0.2	0.5	52.2
13	JABAR	4.5	0.5	1.2	1.1	0.5	42.7
14	NTT	0.7	0.3	0.7	0.7	0.4	62.5
15	MALUKU UTARA	0.7	1.0	2.3	0.0	0.4	19.3
16	GORONTALO	1.4	0.3	1.0	0.3	0.4	50.8
17	KALBAR	2.5	0.2	0.8	0.0	0.3	61.7
18	SUMSEL	1.0	0.3	1.4	4.3	0.3	53.7
19	NAD	0.4	3.4	0.8	0.2	0.3	3.7
20	KALSEL	1.7	0.2	1.6	0.0	0.2	44.9
21	BANGKA BELITUNG	1.8	0.2	0.2	2.1	0.2	53.7
22	RIAU	0.7	0.1	0.2	0.0	0.1	58.3
23	SULTENG	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	76.9
24	YOGYAKARTA	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	60.0
25	BANTEN	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	20.0
26	NTB	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	50.0
27	KALTENG	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
28	JAMBI	0.1	NA	NA	0.0	0.0	NA
Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	46.45

Sumber : Diolah dari data Direktorat Standarisasi & Akreditasi

Berdasarkan data dalam tabel tersebut terlihat bahwa daerah Sumatera Utara meskipun tidak memiliki jumlah industri pengolahan terbesar, namun mampu menyumbangkan 59,6 persen dari total industri nasional. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang dicapai Jawa Timur, yang hanya memberikan kontribusi produksi nasional sebesar 11,5 persen, meskipun memiliki jumlah industri pengolahan hampir dua kali jumlah industri di Sumatera Utara.

Kemampuan produksi yang secara proporsional rendah jika dibandingkan jumlah industri pengolahan juga terjadi di DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, meskipun tidak separah kondisi di Jawa Timur.

4.3. Review Kebijakan Impor Udang

Rendahnya kemampuan Jawa Timur, dan DKI Jakarta memberikan kontribusi produksi nasional yang besar, ditengarai disebabkan oleh keterbatasan bahan baku. Namun, perlu diingat bahwa dalam pembahasan Tabel 2 di atas dijelaskan bahwa kemampuan produksi udang Indonesia masih hampir lima kali lipat dari kebutuhan udang nasional. Hal ini sebenarnya menunjukkan Indonesia tidak mengalami keterbatasan bahan baku.

Namun telah dijelaskan pula dalam pembahasan 4.1. di atas bahwa peningkatan nilai ekspor yang sangat tinggi

menyebabkan jumlah udang yang dapat digunakan masyarakat maupun industri pengolahan menjadi terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pasar udang domestik terjadi persaingan memperebutkan bahan baku udang untuk tujuan ekspor dan pemenuhan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

Keterbatasan bahan baku yang diperebutkan untuk ekspor dan industri pengolahan menunjukkan perlunya dilakukan kebijakan dalam mengatur *Supply Chain Management* (SCM) dalam industri udang. Tujuan utama dari SCM adalah memberikan peraturan yang menjamin industri pengolahan dalam negeri memperoleh bahan baku yang mereka butuhkan.

Namun, terkadang konsep ini tidak dapat dilakukan, jika terjadi arogansi sektoral antara produsen udang domestik dengan industri domestik. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan oleh adanya kontrak jangka panjang atau kebijakan dari perusahaan produsen udang yang dimiliki oleh investor asing untuk menjual produksi mereka ke luar negeri tanpa memperdulikan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

4.4. Perbandingan Keterbatasan Bahan Baku Untuk Industri Pada Produk Lain

Hasil kajian menunjukkan bahwa industri pengolahan udang di Indonesia

seharusnya tidak mengalami kendala dalam memperoleh bahan baku karena ketersediaan uang yang melimpah. Namun kendala di mana industri mengeluhkan keterbatasan kesediaan bahan baku karena kriteria maupun harga yang tidak sesuai menunjukkan adanya permasalahan distribusi uang di Indonesia.

Menyadari kendala tersebut, perlu kiranya dipelajari kebijakan yang dilakukan dalam produk lain untuk mengatasi keterbatasan bahan baku tersebut. Terdapat dua contoh komoditi yang dapat diangkat dalam kasus ini, yaitu industri minyak goreng dan gula.

4.4.1. Minyak Goreng

Kasus minyak goreng merupakan contoh di mana produk tersebut sangat ditujukan ke pasar ekspor, karena di Indonesia belum berkembang dengan pesat industri pengolahan minyak sawit. Salah satu buktinya adalah Rasio konsumsi per produksi CPO masih rendah. Produk minyak sawit yang cenderung di ekspor menyebabkan industri minyak goreng mengalami kendala bahan baku,

dan meminta bantuan pemerintah dalam mengatasi hal ini⁶.

Pemerintah dalam rangka mengatasi hal ini mengeluarkan penetapan pajak ekspor CPO berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008 yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan bahan baku industri minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

Peraturan tersebut bertujuan membatasi ekspor CPO yang dapat diserap pasar dalam negeri untuk diproduksi menjadi minyak goreng. Salah satu indikator keterjaminan minyak goreng adalah harga produk tersebut yang relatif stabil. Melihat tidak terjadinya lonjakan harga minyak goreng dalam periode pelaksanaan peraturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PE CPO berjalan efektif⁷.

4.4.2. Gula

Gula merupakan produk sensitif di Indonesia, dan masuk kedalam spesial produk dalam negosiasi pertanian dalam

⁶ Adrian D. Lubis, Yati Nuryati, Arief Adang, Erwidodo. 2007. IMPACTS OF TRADE LIBERALIZATION ON THE FOOD PROCESSING INDUSTRY IN INDONESIA: AN EXAMINATION OF STRUCTURE, CONDUCT, AND PERFORMANCE, APEC Project, ATC 01/2006T

⁷ Sebenarnya sudah terdapat kebijakan yang bertujuan meningkatkan industri pengolah CPO. Salah satu contohnya adalah rencana **Dirjen Industri Agro dan Kimia**, dalam **Roadmap Departemen Perindustrian**, dimana pada tahun 2010 Indonesia akan memproduksi Biodiesel sebesar 6 juta ton, dengan tujuan pasarekspor. Namun, sampai saat ini, volume ekspor biodiesel periode Jan-Mei 2008 baru mencapai 29,4 ribu ton. Rendahnya nilai ekspor biodiesel menunjukkan masih perlu dirumuskan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan industri pengolahan minyak sawit nasional.

*World Trade Organization (WTO)*⁸. Masuknya produk gula sebagai produk sensitif berarti Indonesia akan membatasi liberalisasi untuk produk tersebut, dan sedapat mungkin mengurangi impor produk yang bersangkutan.

Kebijakan pembatasan impor gula memberikan tekanan pada industri makanan dan minuman berbahan baku gula seperti permen, sirup, minuman bersoda, dan sebagainya. Industri tersebut meminta izin untuk mengimpor gula dengan alasan gula domestik tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menindaklanjuti kebutuhan ini, maka pemerintah mengeluarkan SK Mendag No.527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia serta menciptakan swasembada gula, meningkatkan daya saing dan pendapatan petani tebu. Dalam industri gula, perlu diambil upaya untuk menjaga pasokan gula sebagai bahan baku dan konsumsi yang berasal dari impor.

Kebijakan ini memberikan izin impor terbatas bagi impor gula baik dalam bentuk raw sugar maupun gula rafinasi. Namun, agar kebijakan ini tidak memberikan dampak negatif pada petani dan industri pengolahan gula, maka Dep. Pertanian

menindaklanjutinya dengan kebijakan revitalisasi petani tebu dan industri gula. Kebijakan ini diharapkan membantu meningkatkan daya saing industri gula Indonesia.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kajian ini adalah :

1. Indonesia memiliki jumlah produksi udang yang hampir dua kali lipat dari kebutuhan domestik, sehingga sebenarnya tidak membutuhkan impor udang. Hal ini dipertegas dengan rasio produksi terhadap ekspor yang semakin turun dan rasio produksi terhadap pemasaran domestik yang semakin meningkat.
2. Industri pengolahan mengeluhkan pasokan udang domestik tidak mencukupi kebutuhan mereka, meskipun data sekunder tidak menunjukkan hal tersebut. Namun disisi lain sebagian industri pengolahan menyampaikan keluhan mengenai ketidaksesuaian bahan baku domestik dengan kebutuhan mereka.

⁸ Presentasi Ibu Menteri Perdagangan yang berjudul "KONFERENSI TINGKAT MENTERI (KTM) DDA-WTO", 21-27 Juli 2008, yang disampaikan pada presentasi dengan stake holders mengenai posisi perundingan Indonesia di WTO.

3. Industri pengolahan paling banyak berada di daerah Jawa Timur, namun mereka memiliki produktifitas yang rendah. Hal ini diperkirakan karena keterbatasan bahan baku.
4. Meskipun Indonesia belum membutuhkan udang impor karena ketersediaan bahan baku udang yang melimpah, namun perlu dilakukan serangkaian kebijakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku udang bagi industri pengolahan, untuk menghindari kelangkaan bahan baku, seperti kasus di daerah Jawa Timur.

5.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah :

1. Alternatif I : Membangun industri pengolahan udang bertujuan ekspor dengan memberikan bahan baku termurah dan mengizinkan impor udang terbatas yang tidak merugikan petambak.
2. Alternatif II : Melindungi produsen (petambak) udang dengan pasar domestik dan ekspor dengan tidak mengizinkan impor udang, namun

harus meningkatkan kinerja produsen dan menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam bentuk tataniaga udang (contoh kasus: gula).

3. Jika dilakukan kebijakan impor udang, kebijakan tersebut sebaiknya dirumuskan melalui kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, dan tetap diperlukan aturan sertifikasi asal (*Rules Of Origin*) dan pemenuhan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ketat bagi udang impor, untuk mencegah kegiatan transshipment dan lebih dari pada itu mencegah terjadi kontaminasi dan atau perpindahan hama dan penyakit dari udang dari luar Indonesia ke dalam wilayah Indonesia .
4. Hasil perhitungan data sekunder menunjukkan pasar domestik sebenarnya berlimpah dengan bahan baku, namun industri selalu mengeluhkan keterbatasan bahan baku. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh informasi sebenarnya mengenai ketersediaan udang nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aisya, L.K., S., Koeshendrajana, K. Karyasa, 2005. Analisis Dampak Kebijakan Insentif Dan Kinerja Pasar Udang Indonesia Menghadapi Era Liberalisasi Perdagangan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Departemen Perdagangan, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) DDA-WTO, 21-27 Juli 2008, Jakarta.

Farida, 2008. Analisis Kinerja Sektor-Sektor Industri Pengolahan di Luar Minyak dan Gas Dalam Menghadapi Globalisasi dan Meningkatkan Daya Saing. Bahan dalam Simposium "Indonesia Recovery: Tantangan Pembangunan Ekonomi". Program Pascasarjana UPI-YAI, Jakarta.

Huseini, M. 2007. Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan Untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat. Disampaikan Pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia, 21 Nov. 2007.

Lubis, A., Y. Nuryati, A. Adang, Erwidodo. 2007. Impacts Of Trade Liberalization On The Food Processing Industry In Indonesia: An Examination Of Structure, Conduct, And Performance, APEC Project, ATC 01/2006T

Lubis, A., Siswanti, S. Widayanta, R. Simunjuntak, Syariful, D. Hartono, I. Maidir. 2007. Kajian Dampak Penurunan Tarif Terhadap Produk Perikanan, Kehutanan Dan Kimia Indonesia. Puslitbang Perdagangan Luar Negeri, Badan Litbang Perdagangan. Jakarta.

Mohamad T., 2004. Analisis Penentuan Struktur Kredit Petambak Plasma Udang Windu pada PT. ABC (Studi Kasus Pada Bank X). MB-IPB.

Neraca, 22 Juli 2004. Impor Udang Jangan Dilarang, Tapi Dihambat. Jakarta.

Purnawan, Z. 2005. Perencanaan Tambak Udang Intensif Di Lamonde - Kec. Watubangga Propinsi Sulawesi Tenggara. JBPTITBSI-ITB.

Roadmap Industri Pertanian, 2008. Departemen Perindustri

Syam, A.H. 2008. Strategi Pemasaran Udang Windu (*Penaeus Monodon*) di Kabupaten Wajo. www.indoskripsi.com

Trobos, Agustus 2008. Sekadar Gudang Bahan Baku. Jakarta.